

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai fungsi yang krusial terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat (Laksono, A. et al.). Kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kurikulum menjadi tolak ukur kesuksesan pendidikan pada mencapai tujuan tersebut (Susilo & Fitriani, 2021) Pembangunan suatu negara di pengaruhi oleh faktor bagaimana kualitas sumber daya manusianya (Susilo, 2020) dan peningkatan mutu tersebut dapat dicapai melalui pengembangan bidang pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah aspek krusial pada pembangunan negara (Saripudin, 2005).

Pemerintah memiliki peran penting pada mengoptimalkan kualitas pendidikan dengan mengutamakan pendidikan di semua golongan rakyat dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan pendidikan di semua kalangan masyarakat serta memenuhi hak seluruh warga negara pada mendapatkan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan, banyak anak Indonesia tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap putusnya anak sekolah yaitu kurangnya keinginan dan kemauan untuk sekolah. Siswa tidak berminat pada sekolaah, ketidakmampuan mengikuti / mengambil pelajaran, ekonomi keluarga, orang tua kurang perhatian, dan lingkungan bermain anak – anak (Cahyani et al, 2019).

Pembukaan UUD 1945 secara jelas menjelaskan salah satu melalui pendidikan, yang secara rinci diatur pada Pasal 31 Ayat (3), menegaskan "Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak." Pernyataan ini membuktikan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendidikan di Indonesia. Beragam peraturan dikeluarkan pemerintah sebagai cara untuk memaksimalkan pendidikan.

Langkah yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan penerapan program wajib belajar 12 tahun. Program ini diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 Thn 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 Ayat 18, menjabarkan tentang wajib belajar merupakan program pendidikan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, PP RI No. 47 Thn 2008 tentang Wajib Belajar bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas secara merata. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan dasar yang memadai, sehingga individu dapat mengembangkan potensi dirinya, mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) memiliki target untuk memberikan layanan, memperluas dan meratakan pada mendapatkan pendidikan menengah yang berkualitas kepada seluruh warga negara Indonesia yang berumur

16 – 18 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2020. Indikator kesuksesan PMU meliputi tersedianya biaya operasional yang mencukupi. Selain itu, tingkat kelulusan siswa juga menjadi indikator penting untuk mengukur kesuksesan program ini. Fakta empiris membuktikan masih terdapat kesenjangan pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan kurangnya infrastruktur (Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

Terhitung sejak Juni 2015, pemerintah Indonesia telah meresmikan program wajib belajar 12 tahun. Program ini memiliki tujuan untuk menegaskan bahwa setiap rakyat dapat memiliki minimal pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Percepatan pelaksanaan program ini menjadi prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Beberapa hal yang dilakukan pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, diantaranya adalah (1) Pemerintah dan pemda memastikan bahwa program belajar pada pendidikan dasar tidak dipungut biaya; (2) Pemerintah memberikan fasilitas pendukung agar program wajib belajar 12 tahun berjalan secara maksimal; (3) Pemerintah melakukan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (4) Pemerintah mendaftarkan para anak yang seharusnya sekolah namun tidak bersekolah; (5) Pemerintah menerapkan strategi untuk memberikan

bekal kepada anak – anak agar bisa bersaing di masyarakat dunia; (6) Pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Sosial Sekolah (BOS) (Iranisa & Marihot Nasution, 2022)

Terlepas dari progam wajib belajar 12 tahun telah diresmikan, masih terdapat beberapa tantangan pada mencapai tujuannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkatan tamatan pendidikan, terutama pada jenjang SMA / sederajat. Data BPS tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah membuktikan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan untuk SMA / sederajat baru mencapai 58,35% hal ini membuktikan bahwa masih banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA / sederajat atau putus sekolah (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024). Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki tujuan untuk mempermudah siswa dalam hal biaya untuk bersekolah agar tingkat tamatan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan program itu masih banyak kendala yang dihadapi contohnya pemberian yang tidak maksimal disebabkan geografis sehingga memerlukan waktu (Kemendikbudristek, 2022).

Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Angka Persentase (16 – 18 Tahun)
----	------------------	-------------------------------------

1	Kabupaten Cilacap	68,9%
2	Kabupaten Banyumas	72,64%
3	Kabupaten Purbalingga	69,9%
4	Kabupaten Banjarnegara	61,1%
5	Kabupaten Kebumen	76,32%
6	Kabupaten Purworejo	81,55%
7	Kabupaten Wonosobo	65,07%
8	Kabupaten Magelang	69,87%
9	Kabupaten Boyolali	78,51%
10	Kabupaten Klaten	77,56%
11	Kabupaten Sukoharjo	81,06%
12	Kabupaten Wonogiri	78,19%
13	Kabupaten Karanganyar	88,39%
14	Kabupaten Sragen	82,5%
15	Kabupaten Grobogan	56,22%
16	Kabupaten Blora	78,43%
17	Kabupaten Rembang	75,45%
18	Kabupaten Pati	69,66%
19	Kabupaten Kudus	66,27%
20	Kabupaten Jepara	68,21%
21	Kabupaten Demak	73,12%
22	Kabupaten Semarang	72,93%
23	Kabupaten Temanggung	74,73%
24	Kabupaten Kendal	72,66%
25	Kabupaten Batang	65,6%
26	Kabupaten Pekalongan	65,62%
27	Kabupaten Pemalang	64,78%
28	Kabupaten Tegal	69,11%
29	Kabupaten Brebes	62,72%
30	Kota Magelang	85,63%
31	Kota Surakarta	76,16%
32	Kota Salatiga	83,59%
33	Kota Semarang	69,53%
34	Kota Pekalongan	69,35%
35	Kota Tegal	74,58%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah)

Komitmen pemerintah yang mewajibkan 20 % Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) didistribusikan untuk biaya pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi sekolah yang belum memadai juga

menjadi kendala dimana kurang dari 40% ruang sekolah pada keadaan baik, dan sisanya berada pada keadaan rusak ringan sampai berat. Faktor tersebut tentu saja akan memiliki pengaruh untuk di sekolah (Susilo, 2021). Faktor lain yang perlu dipindai adalah upaya meningkatkan validasi data pokok pendidikan sehingga bantuan pendidikan tepat sasaran, terutama daerah - daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi dan angka partisipasi kasar (APK) di bawah rata - rata.

Kabupaten Pati telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pendidikan. Pada Pasal 57 Ayat 2, disebutkan bahwa pemda memiliki tanggung jawab untuk memastikan program ini terlaksana. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini dirancang guna meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang berpegang teguh pada ajaran agama sehingga mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebagai program unggulan, wajib belajar 12 tahun merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warganya. Untuk memastikan kesuksesannya, peraturan ini menetapkan beberapa indikator utama, yaitu: 1) Ketersediaan biaya operasional pendidikan, 2) Pemberian beasiswa bagi siswa yang membutuhkan, 3) Tingkat kelulusan siswa yang optimal. Dari permasalahan tersebut dapat

diidentifikasi beberapa isu krusial yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: (1) Adanya kesenjangan antara target kebijakan dengan realitas di lapangan; (2) Belum tercapainya manfaat jangka panjang program wajib belajar 12 tahun secara optimal, serta; (3) Rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di daerah terpencil, akan pentingnya pendidikan. Selain itu kesulitan ekonomi keluarga juga menjadi penghambat utama bagi anak – anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan.

Namun, pelaksanaan program ini di Kabupaten Pati belum mencapai hasil optimal. Bidang pendidikan masih menghadapi tantangan utama, yakni rendahnya akses dan kualitas pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat (Susilo, 2020). Hal ini diakibatkan pada berbagai faktor, yaitu: (1) Layanan pada sekolah dasar yang belum maksimal; (2) Sekolah SMP, pendidikan untuk anak kecil, dan belajar di luar sekolah seperti program kejar paket.; (3) Kurikulum yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan zaman dan kurangnya pengelolaan tenaga pendidik serta kependidikan secara maksimal; serta (4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pendidikan.

Berikut ini merupakan poin-poin utama permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Pati.

Tabel 1. 2 Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan dasar pendidikan belum memiliki pelayanan yang optimal	Pengelolaan dasar pendidikan, sekolah menengah pertama, PAUD, serta pendidikan non formal / kesetaraan belum optimal
		Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan dasar pendidikan belum optimal
		Persiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan belum optimal
	Kurikulum sesuai perkembangan zaman belum optimal	Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal belum mengalami penyesuaian.
		Dasar Kompetensi muatan lokal masih belum terorganisir dengan baik.
	Mengelola pendidik dan kependidikan belum optimal	Penyebaran pendidikan dan tenaga pendidik belum terdistribusi secara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		merata.
		Kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan masih bervariasi.
	Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pendidikan belum optimal	Kompetensi serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih belum setara.
		Pengawasan dan pengendalian izin penyelenggaraan pendidikan dasar oleh masyarakat belum berjalan maksimal.

(Sumber : Statistik Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2, permasalahan utama pada bidang pendidikan di Kabupaten Pati adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Akar masalahnya terletak pada kurangnya penyediaan layanan dasar pendidikan, belum optimalnya dukungan pembiayaan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakmerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang belum optimal, dan kurangnya kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Akibatnya, potensi sumber daya manusia di Kabupaten Pati belum dapat termaksimalkan.

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan sebagai pedoman untuk mencapai target SPM, termasuk di padanya target wajib belajar 12 tahun. Dokumen ini memiliki tujuan untuk menjamin setiap warga negara, terutama anak usia sekolah, memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Data yang membuktikan hanya 786 dari 45.925 penduduk usia 16 – 18 tahun yang terlayani oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan pada penyediaan layanan publik. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain kekurangan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pada perencanaan dan pelaksanaan program SPM. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pati telah merumuskan berbagai strategi, salah satunya adalah penyesuaian kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

**Tabel 1. 3 Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)
di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	7,44%	7,48%	7,79%	7,80%	7,80%

(Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan Tabel 1.3, tampak bahwa Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pati terjadi pertambahan dari tahun 2020 hingga 2024. Jika

dibandingkan dengan target provinsi yang sebesar 8%, Kabupaten Pati belum berhasil mencapai angka tersebut. Selama periode yang diamati, RLS di Kabupaten Pati terus menunjukkan tren positif. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang signifikan pada meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di tingkat kabupaten. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan, seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, atau program beasiswa.

**Tabel 1. 4 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	72,51%	72,90%	70,09%	69,66%	68,47%

(Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan Tabel 1.4, tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SMA/SMK/MA Kabupaten Pati menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian APS Kabupaten Pati tahun 2024 sebesar 68,47% masih dibawah target Provinsi yang ditetapkan sebesar 70,46%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pati belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada usia 16 tahun sampai 18 tahun dengan jumlah 45.925 jiwa dan jumlah siswa yang bersekolah hanya 31.446 jiwa, terdapat potensi besar siswa yang belum melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel 1. 5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	101,34%	102,60%	102,10%	95,08%	82,33%

(Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan Tabel 1.5, tren Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan pada awal periode, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Target APK Provinsi di tahun 2024 adalah 87,84%. Sementara itu, Kabupaten Pati hanya mencapai 82,33%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pati belum berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh Provinsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya fluktuasi yang cukup besar pada minat masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya ke jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel 1. 6 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	63,44%	63,50%	63,71%	64,22%	67,42%

(Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan Tabel 1.6, meskipun Kabupaten Pati berhasil melampaui target provinsi pada hal Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA,

terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan. Peningkatan kuantitatif peserta didik belum tentu diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kemungkinan besar terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, faktor yang mendorong peningkatan APM belum tentu berasal dari motivasi intrinsik siswa untuk belajar, melainkan bisa jadi karena faktor eksternal seperti program pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan peningkatan APM dan kualitas pendidikan yang diperoleh siswa. Pada konteks wajib belajar 12 tahun, peningkatan APM belum menjamin pemerataan akses, kelulusan, maupun kesiapan individu dalam lanjut studi ke lebih tinggi.

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 12 tahun, anggapan bahwa pendidikan 12 tahun tidak menjamin pekerjaan yang layak, kesulitan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anak hingga 12 tahun. Selain itu, masih terdapat kekurangan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil dan kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. (Susilo, 2022).

Teori Implementasi Merilee S. Grindle menyatakan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam konteks program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati, isi kebijakan sudah jelas, tercermin dalam adanya Perda dan petunjuk teknis pelaksanaan yang mendukung. Program ini selaras dengan tujuan

pembangunan nasional dalam peningkatan sdm melalui pendidikan. Kesuksesan program ini dapat diukur dengan melihat indikator keaktifan siswa, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, keterlaksanaan program ini juga dinilai *feasible*, mengingat sumber daya yang tersedia di Kabupaten Pati sudah memadai untuk mendukung implementasinya. Namun, lingkungan implementasi program ini masih perlu dioptimalkan. Dukungan politik dari pemerintah daerah sudah cukup baik, namun dukungan masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang manfaat pendidikan 12 tahun. Kapasitas pelaksana, seperti kualitas guru dan tenaga kependidikan, perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini. Sumber daya, seperti infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, perlu ditingkatkan untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Keterlibatan *stakeholder*, seperti kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, perlu dioptimalkan untuk mendukung program ini. Teori Implementasi Merilee S. Grindle menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980:10) dan Qade (1984:310), implementasi kebijakan memerlukan keterkaitan dan sinergi antara tiga variabel utama yang memengaruhi kesuksesannya, yaitu kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana, dan lingkungan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dan efektif antara ketiga elemen tersebut. Tachjan menambahkan bahwa implementasi kebijakan juga memerlukan beberapa unsur pokok yang tidak boleh diabaikan, yaitu: (1) Unsur pelaksana,

yang mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan; (2) Adanya program yang jelas dan terstruktur; dan (3) Target group atau kelompok sasaran, yang merupakan pihak yang langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut (Tachjan (2006i:26).

Menurut teori proses implementasi kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip Budi Winarno, beberapa hal berpengaruh terhadap kesuksesan, di antaranya (1) Kebijakan dengan tujuan dan ukuran yang tidak; (2) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (3) Karakteristik badan – badan pelaksana. Sementara itu, Bambang Sunggono mengidentifikasi beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, seperti (1) Ketidakjelasan isi kebijakan; (2) Kurangnya informasi; (3) Minimnya dukungan. (PD Pangestika, 2018)

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pendidikan 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun. Walaupun ada berbagai kendala, dengan solusi yang tepat dan kerjasama semua pihak, program wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Pati.

Banyak penelitian yang mengkaji terkait program wajib belajar 12 tahun (Wawan & Rohmini, 2021). Namun, penelitian - penelitian terdahulu memiliki masalah penelitian, tujuan penelitian, teori, model dan teknik analisis yang berbeda dibandingkan pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman implementasi program wajib belajar 12 tahun di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Pati. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna kepada pemerintah daerah pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati. Sehingga peneliti memilih judul "Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati" sebagai topik penelitian. Hal ini didorong oleh urgensi untuk mengkaji bagaimana proses implementasi program ini dijalankan, mengingat masih banyaknya hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas program, mengatasi hambatan yang dihadapi, dan mewujudkan tujuan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Dari penjelasan tersebut, sehingga memunculkan research question “Mengapa implementasi program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati belum optimal ?”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan antara target kelompok yang ingin di capai oleh kebijakan.

2. Manfaat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dari program wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya terwujud.
3. Perubahan yang ingin di capai oleh kebijakan, yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan secara merata, belum sepenuhnya tercapai.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah terpencil. Tentang pentingnya pendidikan 12 tahun dan manfaatnya bagi masa depan anak.
5. Kesulitan ekonomi keluarga menjadi faktor penghambat utama bagi anak – anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pada melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan penulisan karya ilmiah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memakai hasil proses pembelajaran selama masa perkuliahan, sehingga peneliti dapat mengimplementasikan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian.

2. Bagi Instansi Terkait

Setelah melakukan penelitian, peneliti bisa menyajikan saran - saran kepada pihak pemerintah Kabupaten Pati, berupa langkah-langkah strategis pada meningkatkan capaian program wajib belajar.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis pada menganalisis implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.
2. Dari hasil penelitian ini, hal - hal khusus yang terkait dengan pelaksanaan program di lapangan dapat dicurahkan guna memperpadu aspek - aspek pengembangan teori implementasi kebijakan.

1.6 Kerangka Penelitian Terdahulu

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Urgensi penulisan penelitian ini untuk mencegah adanya duplikasi atau plagiarisme melalui pemetaan penelitian. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan, apakah lebih unggul, lebih sederhana, atau sebanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, pemetaan ini membantu untuk menilai sejauh mana penelitian yang akan ditulis dapat maju atau mundur dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis.

Tabel 1. 7 Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Penulis: Neneng Ratnanengsih, Maria Greissela, Hafijatu Zakiyah, Pingkan, Mila Rahmawati Judul Artikel: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon Tahun: 2024	Penelitian ini bertujuan untuk menpadai makna dibalik pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku; persepsi; dan motivasi; dan tindakan mereka	Teori: Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Grindle mengidentifikasi dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon mencerminkan seriusnya pemerintah pada meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. Dukungan penuh dari pemerintah Kota Cilegon, yang meliputi penyediaan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah dan progam beasiswa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap progam ini	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, beserta metode analisis yang diterapkan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Model: Merilee S. Grindle Tipe Penelitian: Kualitatif - Deskriptif		
Penulis: Elih Yuliah Judul Artikel: Implementasi Kebijakan Pendidikan Tahun: 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk pada kebijakan pendidikan.	Tipe penelitian: Kualitatif	Implementasi adalah aspek paling krusial pada sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan adalah prosedur yang berkaitan dengan tindakan lembaga administratif sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Prosedur pelaksanaan juga terkait dengan aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			mempengaruhi tingkah laku bermacam-macam pihak yang bersangkutan pada program tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan sejumlah prosedur yang mencakup strategi dan pendekatan tertentu yang perlu dilakukan, dengan pemenuhan berbagai kelengkapan dan kecukupan yang dibutuhkan. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk memastikan kesuksesan pada pelaksanaan kebijakan.	
Penulis: Devy Amalia Nur Fitriah & Sungkowo Edy	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan	Tipe Penelitian: Kualitatif	Hasil penelitian Pengelolaan program pendidikan	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan,

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Mulyono Judul Artikel: Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Setia Budi Kabupaten Pati Tahun: 2024	pengelolaan program serta mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Setia Budi, Kabupaten Pati.		kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Setia Budi, Kabupaten Pati, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tahap perencanaan mencakup penyusunan program serta rencana pelaksanaannya, sedangkan tahap pengorganisasian melibatkan pembagian tugas dan pekerjaan kepada setiap pengurus. Pelaksanaan pada pengelolaan mencakup kegiatan pembelajaran dan penyediaan fasilitas pendukung. Pengawasan pada	serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			pengelolaan mencakup pengawasan dari pada dan pengawasan dari luar. Evaluasi pada pengelolaan mencakup penilaian terhadap program dan penilaian terhadap proses pembelajaran. Faktor pendukung terdiri dari tingginya permintaan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan dan adanya dukungan dari pihak pemerintah serta masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat eksistensi warga	

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			belajar, keterbatasan anggaran, dan fasilitas yang tidak memadai. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa tahapan implementasi manajemen rencana pembelajaran setara kejar paket C mencakup perancangan, pengaturan, penerapan, pemantauan, serta penilaian.	
Penulis: Ferdinal Lafendry Judul Artikel: Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pada Dunia Pendidikan Tahun: 2020	Artikel ini mengulas mengenai kualifikasi dan kemampuan pengajar di bidang pembelajaran.	Tipe Penelitian: Kualitatif	Kualifikasi akademik yang meningkatkan menjadi salah satu faktor penting dalam profesionalisme pengajar yang meningkatkan. Tanpa adanya kualifikasi akademik yang meningkatkan, kemungkinan guru untuk	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			profesional menjadi rendah. Pengajar juga harus memiliki 4 kemampuan, yaitu kemampuan pengajaran, profesional, sosial, dan karakter (etika). Pengajar profesional merupakan pengajar memiliki kemampuan diperlukan melaksanakan tugas pembelajaran dan mengajar. tingkat pembelajaran amat dipengaruhi oleh mutu pengajar.	
Penulis: Riski Tri Widyastuti Judul Artikel: Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu	Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk memahami pengaruh positif dan negatif dari penerapan sistem Zonasi bagi	Tipe Penelitian: Kualitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa 1). Sistem Zonasi bisa menyamaratakan akses pendidikan. 2). Masih ada penyimpangan	Terletak di judul penelitian, masalah, tujuan, serta teknik untuk analisis yang digunakan pada penelitian

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Sekolah dan Peserta Didik Tahun: 2020	siswa serta kualitas pendidikan.		oleh beberapa individu, baik dari orang tua maupun lembaga pendidikan. 3). Sistem Zonasi mempengaruhi perkembangan siswa. Hasil penelitian itu bermanfaat untuk memahami mengenai penerapan sistem Zonasi di Indonesia.	
Penulis: Firman Kurniawan, Nazaki, Yudhanto Satyagraha Adiputra Judul Artikel: Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam Tahun: 2023	Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Batam.	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut George Edward III menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut	Menerapkan prosedur sekolah ramah anak di Kota Batam, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 005 Batam Kota, SDIT AI Muhajirin Dotamana, Sekolah Menengah Pertama 28 Batam telah berjalan dengan baik, di mana lembaga pendidikan telah	Perbedaan pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang diterapkan, serta metode analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		diimplementasikan. Model: George Edward III Tipe Penelitian : Deskriptif - Kualitatif	menyesuaikan diri dengan tolak ukur pencapaian sekolah yang ramah terhadap anak yang tertera pada Keputusan Surat Kepala Dinas Kota Batam.	
Penulis: Bashori & Septi Gia Aprima Judul Artikel: Analisis Kebijakan Progam Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Lampung Tahun: 2019	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi masyarakat, terutama warga Provinsi Lampung, agar lebih perhatian terhadap pendidikan anak..	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut Heinz Weihrich dan Harold Koontz menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam organisasi.	Program pendidikan wajib 12 tahun di Lampung telah mendekati pencapaian maksimal, dengan 95% masyarakat berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tersebut.	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang diterapkan

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Model: Heinz Weihrich dan Harold Koontz Tipe Penelitian:Metode analisis data pada penelitian ini memakai model Miles dan Huberman, yang mencakup Reduksi data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. (Fatimah, 2018).		
Penulis: Pipit Pratiwi & Edhi Siswanto Judul Artikel: Implementasi Progam Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis Tahun: 2023	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan isu-isu yang timbul, yaitu untuk mendapatkan wawasan mengenai pelaksanaan program wajib pendidikan 12 tahun.	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Mereka mengidentifikasi beberapa	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pendidikan wajib 12 tahun di Desa Pakis, Kabupaten Jember (2022-2023), tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan. Tantangan dalam	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model implementasi kebijakan yaang digunakan, serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		variabel kunci yang saling terkait dan mempengaruhi proses implementasi. Model: Model Van Meter Van Horn Tipe Penelitian : Deskriptif - Kualitatif	pelaksanaan program ini meliputi rendahnya tingkat penghasilan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, serta waktu yang dibutuhkan anak untuk menempuh perjalanan ke sekolah.	
Penulis: Yuliwati Yuliwati Judul Artikel: Wajib Belajar 12 Tahun Pada Realita di Wilayah kabupaten Bogor Tahun: 2023	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah lokal Kabupaten Bogor pada mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut George Edward III menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan	Pemahaman orang tua dan komunitas mengenai pendidikan yang rendah, akses pendidikan yang belum merata di setiap daerah, budaya yang belum ramah terhadap teknologi digital, serta terhambatnya koordinasi manajerial dan administrasi antara	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang digunakan, serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		tersebut diimplementasikan. Model: George Edward III Tipe Penelitian : Deskriptif - Kualitatif	pemerintah kabupaten dan provinsi menyebabkan program wajib belajar 12 tahun belum tercapai.	
Penulis: Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, Rochmani Judul Artikel: Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model Tahun: 2023	Penelitian ini bertujuan guna memahami dan menggambarkan pelaksanaan model kebijakan Van Meter dan Van Horn.	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Mereka mengidentifikasi beberapa variabel kunci yang saling terkait dan mempengaruhi proses implementasi.	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung sudah melaksanakan kebijakan sistem zonasi, namun belum mencapai hasil yang maksimal.	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang digunakan, serta metode analisis data yang diterapkan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Model: Model Van Meter dan Van Horn Tipe Penelitian : Kualitatif – Deskriptif		
Penulis: Benny Irawan, Maria Veronika Roesminingsih, Bambang Sigit Widodo, Erny Roesminingsih Judul Artikel: The Influence of Communication on Policy Implementation: The mediating Role of Disposition Tahun: 2023	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak komunikasi dan disposisi terhadap implementasi kebijakan, dengan penekanan khusus pada peran moderasi disposisi pada hubungan antara komunikasi dan implementasi kebijakan	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan Publik menurut George Edward III menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Model: George Edward III	Komunikasi mempunyai dampak besar dan positif terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan disposisi juga mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan kebijakan	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang digunakan, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Tipe Penelitian : Partial Least Squares Structural Equality Modeling (PLS-SEM)		
Penulis: Hendra Cahyadie, Rulinawaty Kasmad, Syamsuri, Agus Joko Purwanto Judul Artikel: Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services Tahun: 2024	Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep pelaksanaan kebijakan.	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan menurut George Edward III menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Model: George Edward III Tipe Penelitian :	Hasil penelitian membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) pm 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Pada Negeri dinyatakan berlaku di Unit Pengelola Bandar Udara II Iskandar Pangkalan Bun baik dari segi ketersediaan troli maupun fasilitas papan pengumuman elektronik	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, teori dan model pelaksanaan kebijakan yang digunakan, serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Kualitatif - Deskriptif		
Penulis: Anang Syakhfiani, Sampara Lukman, Khasan Effendy, Marja Sinurat Judul Artikel: New Model Policy Implementation Gerbang Emas Bersinar to Increase the Human Development Index in Tabalong Regency Tahun: 2020	Penelitian ini mencoba memperkenalkan model implementasi kebijakan baru yaitu modus campuran (mixed mode) sebagai solusi permasalahan tersebut.	Teori: Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Grindle mengidentifikasi dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Model:	Model baru yang diperkenalkan pada Implementasi kebijakan “Gerbang Emas Bersinar” yaitu model Pola Campuran diharapkan mampu lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Model ini dapat menjadi solusi terhadap faktor penghambat Implementasi “Gerbang Emas Bersinar”. Kebijakan karena model ini menawarkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai fasilitator dan inisiator kebijakan. Model ini dinilai	Perbedaan berada pada judul penelitian, masalah, tujuan, , serta metode analisis yang digunakan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Marilee S. Grindle Tipe Penelitian : Kuantitatif - Deskriptif & Eksploratif	mampu menciptakan kepercayaan dan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat.	
Penulis: Syahrul Mubarak, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, Suryadi Judul Artikel: Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle. and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework Tahun: 2020	Penelitian kebijakan merupakan suatu kajian terhadap kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan publik atau kebijakan yang di implementasikan .	Teori: Teori Pelaksanaan Kebijakan menurut George Edward III menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Model: George Edward III Tipe Penelitian :	Suatu rancangan metode analisis pelaksanaan kebijakan yang disadarkan pada model pelaksanaan kebijakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan metode analisis data yang diterapkan pada penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori / Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Kualitatif - Deskriptif		

Mengacu pada Tabel 1.7, yang berisi matriks penelitian

sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan sebelumnya. yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti pada pemilihan lokasi, tidak ada yang serupa. Perbedaan yang ke dua dilihat dari masalah dan tujuan penelitian. Meskipun tema yang dibahas serupa, yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun akan tetapi, lokasi yang ditargetkan berbeda, secara otomatis mempengaruhi isu dan sasaran studi. Setiap daerah memiliki masalah yang berbeda, dan peneliti juga melihatnya dari perspektif yang berbeda, sehingga sasaran penelitian setiap peneliti, mulai dari peneliti pertama hingga peneliti keempat belas, pun berbeda. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada metode analisis data yang diterapkan. Peneliti tidak memiliki kesamaan mengenai aspek itu karena teknis analisis data dari Miles dan Huberman. Perbedaan yang keempat yaitu mengenai hasil temuan penelitian. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti meningkatkan kualitas penelitian peneliti dengan memperkuat landasan teori,

memperkaya metodologi penelitian, mempertajam fokus penelitian, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini terletak pada bagian yang lebih maju daripada penelitian sebelumnya karena peneliti mengangkat isu yang belum pernah dikaji sebelumnya di Kabupaten Pati. Hal ini membuktikan bahwa penelitian peneliti memiliki potensi untuk memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap pemahaman mengenai program pendidikan wajib selama 12 tahun di Indonesia.

1.6.2 Kajian Teori

1.6.1.1 Administrasi Publik

Administrasi adalah sesuatu cara komprehensif pada semua kegiatan yang berlangsung pada suatu organisasi untuk memperoleh target organisasi itu (*goals and objectives*). Publik adalah sekelompok individu yang serupa pada berasumsi, mengungkapkan pendapat, ambisi, pendirian, dan perilaku setara dengan adat yang masih berjalan (Pasolong, 2014 :6).

Ide administrasi publik di Indonesia pada prinsipnya bukanlah ide baru, karena ide administrasi publik tersebut telah ada sejak dahulu., Hanya para ahli yang merubah istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Berdasarkan Nigro pada Sodikin (2015:5), menyatakan lima penjelasan tentang administrasi publik, di antaranya:

1. *Public administration is cooperative group effort in public setting* (Administrasi publik merupakan upaya kolaboratif kelompok pada konteks pemerintahan);
2. *Public administration covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationship* (Administrasi publik yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta interaksi di antara ketiganya);
3. *Public administration has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process* (Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting pada penyusunan kebijakan negara, sehingga menjadi bagian dari proses politik);
4. *Public administration is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community* (Administrasi publik memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai kelompok swasta dan individu pada memberikan layanan kepada masyarakat.);
5. *Public administration is different in significant ways from privat administration* (Pada beberapa hal, administrasi publik memiliki perbedaan pengertian jika dibandingkan dengan administrasi privat).

Setelah meninjau berbagai pendapat yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik melibatkan kerja sama antar individu pada organisasi publik untuk menangani masalah-masalah publik berdasarkan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, manajemen

publik yang efektif melibatkan prosedur manajemen yang dirancang dalam menggapai tujuan negara.

Hubungan antara administrasi publik dengan penelitian ini untuk dapat mengetahui bahwa administrasi meliputi banyak hal yang kompleks. Maka keberadaan administrasi bisa memberikan kesejahteraan, ketentraman serta kepuasan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pati.

1.6.1.2 Paradigma Administrasi Publik

Pembahasan terkait administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma administrasi publik yang berlangsung selama ini. Perubahan tersebut disebabkan oleh model lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap paradigma yang ada, sehingga upaya dilakukan untuk membangun model baru. Dikaitkan pada pembahasan paradigma maka Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) menjelaskan bahwa paradigma merupakan sesuatu perspektif, etika, landasan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, yang diterima oleh komunitas ilmiah pada waktu tertentu. Secara singkat, paradigma adalah cara berpikir individu atau kelompok. Nicholas Henry pada Keban (2014:31-33) menyatakan bahwa ada enam paradigma administrasi negara yaitu:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926)

2. Paradigma 2: Prinsip - prinsip Administrasi (1927 - 1937)
3. Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970)
4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956 - 1970)
5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 -?)
6. Paradigma 6: Governance (1990 - sekarang)

Sementara itu, Stoker (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) menambahkan bahwa ada lima proposisi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi ide dari paradigma ini, yaitu:

1. Jaringan lembaga dan pihak-pihak yang berasal dari dalam maupun luar pemerintah.
2. Batas yang tidak jelas serta tanggung jawab pada menangani masalah sosial dan ekonomi.
3. Saling ketergantungan kekuasaan di antara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama.
4. Jaringan aktor otonom yang mengatur dirinya sendiri.
5. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk memerintah atau memakai wewenangnya.

Paradigma Penelitian Ini:

Penelitian ini termasuk pada paradigma ke - 5: Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara berfokus pada kepentingan publik, sejalan dengan tujuan implementasi kebijakan publik yang efektif. Paradigma ini membantu peneliti memahami bagaimana kebijakan dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara juga menyediakan kerangka kerja yang kuat dan relevan untuk meneliti implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati. Paradigma ini membantu peneliti memahami dampak kebijakan pada masyarakat, menganalisis faktor - faktor yang memengaruhi implementasi, mengevaluasi kesuksesan dan kegagalan, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi. Penelitian yang berlandaskan paradigma ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dan kesuksesan program pendidikan wajib 12 tahun di Kabupaten Pati.

1.6.1.3 Kebijakan Publik

Seiring waktu, terdapat berbagai pengertian yang muncul mengenai kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik memiliki berbagai arti yang berbeda, sehingga pengertian-pengertian itu dapat dikategorikan berdasarkan siapa yang mengemukakannya. Berikut adalah beberapa definisi kebijakan publik:

William Dunn pada Pasolong (2011:39) mengungkapkan tentang kebijakan publik merupakan sekumpulan pilihan yang berkaitan diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan lain sebagainya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Pasolong (2011:39), kebijakan publik mencakup segala keputusan yang dipilih oleh pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011:38) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan sumber daya secara strategis untuk menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintahan. Sementara itu, Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2011:39) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang diterapkan melalui perangkat hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk menangkap dinamika sosial di masyarakat, yang kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli tersebut maka dapat dilihat bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan metode atau konsep yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang sedang berlangsung. Thomas R. Dye pada

Nugroho (2012:120) menjelaskan kebijakan Publik mencakup segala hal yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Ada beberapa konsep utama yang terkandung pada kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politik, dan finansial untuk mengimplementasikannya.
- b. Kebijakan publik bertujuan memberikan solusi terhadap masalah atau kebutuhan di masyarakat.
- c. Kebijakan publik bukanlah sebuah keputusan individual, melainkan kumpulan tindakan atau strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas.
- d. Kebijakan publik biasanya diterapkan sebagai langkah bersama untuk mengatasi masalah sosial, berupa keputusan apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan ini mencakup pernyataan atau alasan yang mendasari langkah-langkah atau rencana yang telah disusun oleh suatu lembaga pemerintah atau beberapa lembaga perwakilan pemerintah.

Setiap kebijakan publik yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu, dan berdasarkan jenisnya, kebijakan publik memiliki beragam tujuan. Riant Nugroho (2012:138-141) menjelaskan bahwa tujuan pembentukan kebijakan meliputi pengelolaan dan distribusi sumber daya, pengaturan

atau pemberian kebebasan, mobilisasi sumber daya, pengendalian dinamika yang terlalu cepat, penguatan negara, serta penguatan pasar.

Sebagai sebuah proses, kebijakan terdiri dari berbagai tahapan, dan para ahli memiliki pandangan yang berbeda terkait langkah-langkah tersebut. James E. Anderson, David E. Brandy, dan Charles Bullock III dalam Nugroho (2012:527) membagi proses kebijakan publik menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Agenda kebijakan, pada tahap ini dilaksanakan penentuan prioritas untuk menangani masalah yang dianggap serius dan perlu diselesaikan.
- b. Formulasi kebijakan, pada tahap ini, dilaksanakan pengembangan terhadap berbagai pilihan atau alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah.
- c. Adopsi/penentuan kebijakan, pada tahap ini, salah satu alternatif yang telah disepakati dikembangkan lebih lanjut dan kemudian disahkan atau dilegalkan.
- d. Penerapan kebijakan, pada tahap ini, kebijakan yang telah ditetapkan diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah.
- e. Evaluasi kebijakan, pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan pada mengatasi masalah yang ada.

Tahapan yang serupa juga dijelaskan oleh Thomas R. Dye pada Nugroho (2012:159), yang membagi proses kebijakan publik ke pada enam

fase, yaitu: (1) Identifikasi masalah (problem identification); (2) Penetapan agenda (agenda setting); (3) Formulasi kebijakan (policy formulation); (4) Legitimasi kebijakan (policy legitimation); (5) Implementasi kebijakan (policy implementation); dan (6) Evaluasi kebijakan (policy evaluation).

Pada dasarnya, ada tiga langkah utama dalam peraturan publik: (1) Merumuskan prosedur; (2) Melaksanakan prosedur; dan (3) Mengevaluasi prosedur. Pemilihan isu kebijakan yang ingin diselesaikan harus dipertimbangkan dengan baik. Menurut Riant Nugroho (2012:185), isu kebijakan harus penting, melibatkan banyak orang atau berkaitan dengan kepentingan bersama, berdampak jangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh individu, dan harus menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan isu tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan, melaksanakannya, dan kemudian mengevaluasi apakah kebijakan itu berhasil menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.

1.6.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Studi tentang implementasi kebijakan adalah kajian yang fokus pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sangat kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Eugene Bardach dalam Agustino (2004:138) mengatakan bahwa membuat program atau kebijakan yang terlihat baik di atas kertas itu mudah, namun merumuskannya menjadi kata-kata atau slogan yang menarik bagi

pemimpin dan pemilih itu lebih sulit. Yang lebih sulit lagi adalah melaksanakannya dengan cara yang memuaskan semua pihak, termasuk mereka yang dianggap sebagai klien. Berdasarkan hal ini, implementasi kebijakan bisa sangat rumit dan penuh tantangan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2004:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah, keputusan eksekutif, atau keputusan badan peradilan lainnya. Keputusan-keputusan ini biasanya mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, dan cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2004:139) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan mencakup tiga hal penting: (1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) Adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) Adanya hasil dari kegiatan tersebut. Penerapan kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan efektivitas.

Efektivitas kebijakan adalah pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas

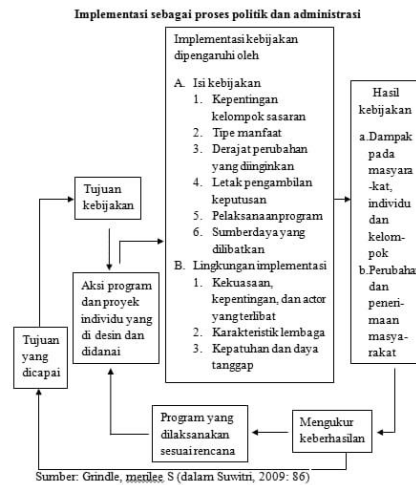
implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant Nugroho (2012:107-110) mengemukakan bahwa ada lima "tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada dapat mengatasi masalah yang ingin diselesaikan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan sesuai untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, penting untuk memastikan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan atau misi kelembagaan yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.
- b. Tepat pelaksanaannya, ada tiga pihak yang dapat bertindak sebagai pelaksana, yaitu pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat / swasta / penerapan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa target tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang sedang diterapkan, sehingga tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara berbagai kebijakan.
- d. Tepat lingkungan, dalam hal ini lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan internal yang berhubungan dengan lembaga terkait dan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pendapat publik terkait kebijakan dan implementasinya.

- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses, yaitu policy acceptance, masyarakat memandang kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memandang sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Strategic Readiness, dimana masyarakat bersedia melakukan serta menjadi bagian dalam kebijakan dan birokrat bersedia menjadi pelaksana.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam suatu proses kebijakan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai kegiatan yang rumit. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari proses yang dijalankan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas kebijakan juga dapat diukur dari lima faktor ketepatan, yaitu kebijakan, pelaksana, target, proses, dan lingkungan. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

- a) Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Metter Dan Carl Van Horn (2012:141 - 144)
- b) Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (2012:144 - 148)
- c) Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III (2012:148-152)
- d) Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle (1980)



Gambar 1. 1 Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

(Sumber: Grindle, merilee S (dalam Suwitri, 2009: 86))

Menurut Grindle, ada dua faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan bisa diukur dari apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Grindle mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

Dilihat dari prosesnya, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan memeriksa apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan kebijakan tercapai. Penilaian ini didasarkan pada dua faktor utama, yaitu:

- a) Dampak atau efek kebijakan pada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, serta sejauh mana perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dan perubahan yang dialami.

- b) Kesuksesan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, sangat dipengaruhi oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang mencakup Content of Policy.

I. Content of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Interest Affected (kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi)

Berbagai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan menjadikan indikator ini berfokus pada seberapa besar pengaruh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.

- b) Type of Benefits (tipe manfaat)

Pada poin ini, *content of policy* bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebuah kebijakan harus mencakup manfaat-manfaat yang dapat menggambarkan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaannya..

- c) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang diinginkan)

Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada pola ini, *content of policy* menjelaskan bahwa perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan harus memiliki ukuran yang jelas dan terdefinisi.

d) Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam kebijakan sangat penting untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagian ini perlu menjelaskan di mana keputusan tersebut diambil dalam kebijakan yang akan dijalankan.

e) Program Impelemter (pelaksana program)

Untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program, diperlukan pelaksana yang kompeten dan *kapabel* agar kebijakan tersebut berhasil. Aspek ini harus dicatat atau diidentifikasi dengan jelas pada bagian ini.

f) Resources Committes (sumber-sumber daya yang digunakan)

Implementasi suatu kebijakan juga memerlukan dukungan sumber daya yang cukup agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan efektif dan lancar.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Dalam suatu kebijakan, diperlukan pertimbangan terhadap kekuatan, urgensi, dan strategi yang akan menjadi dasar bagi pelaksana dalam mempercepat implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik, program yang sedang dijalankan dapat menghadapi berbagai hambatan.
- b) Lingkungan di mana kebijakan dilaksanakan juga memiliki dampak pada kesuksesannya. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik lembaga yang akan memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana pelaksana mematuhi dan merespon kebijakan tersebut. Poin ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan dan respon pelaksana dalam menghadapi kebijakan yang diterapkan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi Dengan memperhatikan isi, konten, dan konteks penerapannya, kita dapat menilai apakah pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan, dan apakah faktor lingkungan mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga menghasilkan perubahan yang diinginkan. Berdasarkan berbagai model teori implementasi kebijakan, peneliti memilih Teori Implementasi

Kebijakan Grindle (1980) untuk diterapkan dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati.

Tabel 1. 8 Komparasi Teori Implementasi Kebijakan

No	Teori Implementasi Kebijakan Publik	Fokus Utama	Kekurangan Utama
1	Donald Van Metter dan Carl Van Horn(2012:141 – 144)	Model Top – Down, menekankan pada struktur organisasi, komunikasi, sumber daya, dan lingkungan politik sebagai faktor kunci pada kesuksesan implementasi.	Terlalu fokus pada struktur dan proses formal, kurang memperhatikan peran aktor informal dan dinamika sosial pada implementasi. Model ini juga cenderung statis dan kurang mengakomodasi perubahan lingkungan yang dinamis.
2	Daniel Mazmian dan Paul Sabatier(2012:144 – 148)	Model Advocacy Coalition Framework (ACF), menekankan pada interaksi antara berbagai koalisi yang bersaing pada proses pembuatan dan implementasi kebijakan.	Model ACF kompleks dan sulit diterapkan secara empiris, terutama pada konteks kebijakan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak aktor. Model ini juga kurang memperhatikan peran individu dan kepemimpinan pada proses implementasi.
3	George C. Edward III (2012:148 – 152)	Model Street - Level Bureaucrats menekankan pada peran para birokrat lapangan	Model ini terlalu fokus pada tingkat mikro, sehingga kurang memperhatikan

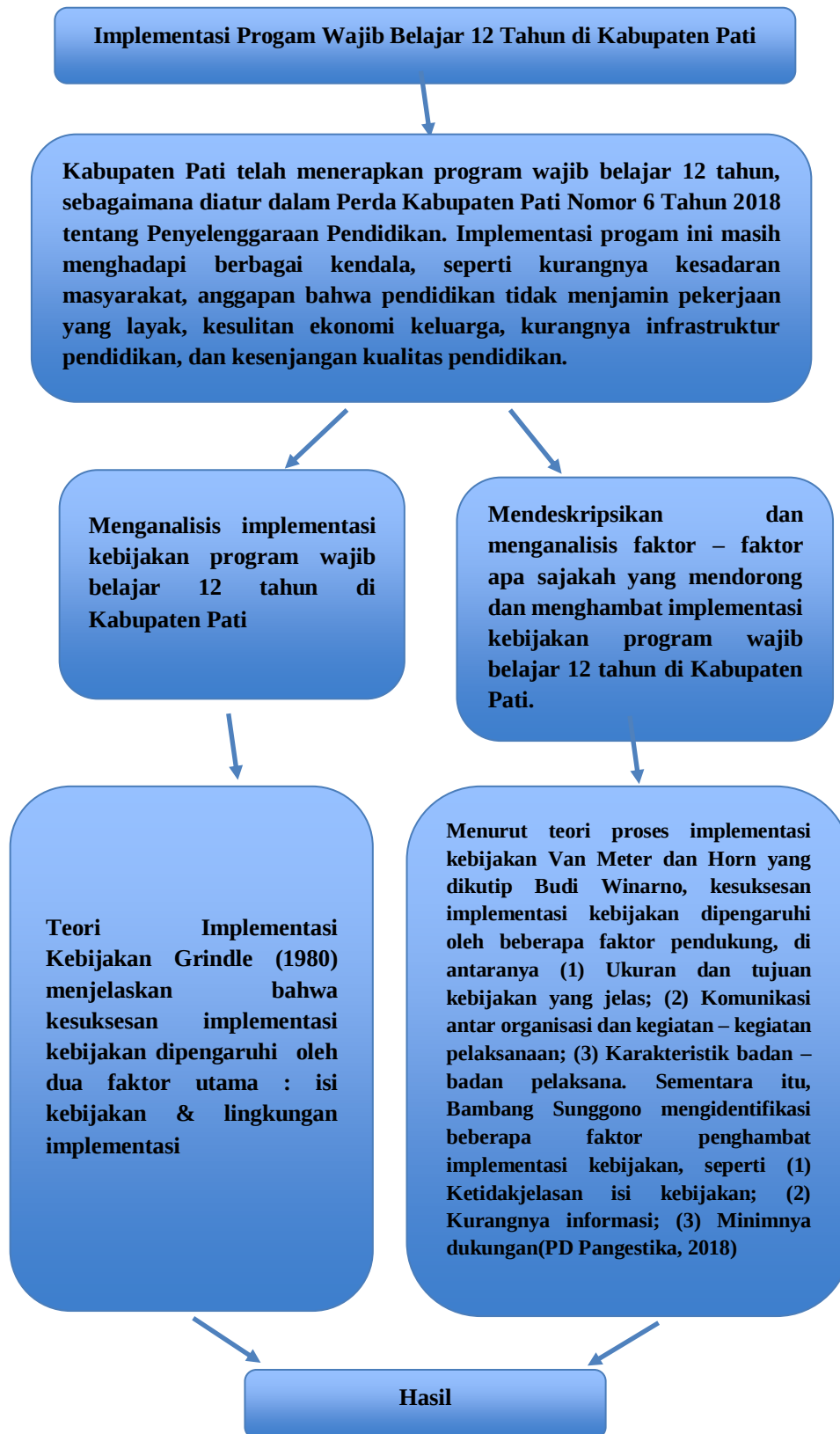
No	Teori Implementasi Kebijakan Publik	Fokus Utama	Kekurangan Utama
		pada proses implementasi kebijakan.	konteks yang lebih luas seperti kebijakan tingkat nasional dan pengaruh lingkungan politik. Model ini juga cenderung mengabaikan peran aktor lain seperti politisi dan kelompok kepentingan.
4	Merilee S. Grindle (1980)	Model Implementasi Kebijakan di Negara Berkembang, menekankan pada kendala struktural, budaya, dan politik yang khas negara berkembang pada proses implementasi kebijakan.	Model ini terlalu generalisasi dan mungkin tidak berlaku untuk semua negara berkembang. Model ini juga kurang memperhatikan variasi pada konteks negara berkembang yang beragam.

Berdasarkan tabel komparasi teori Implementasi Kebijakan Publik tersebut, peneliti memakai Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle dengan mempertimbangkan relevansi teori yang menekankan pada dua faktor utama kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Pada konteks kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati, isi kebijakan sudah cukup jelas, namun tantangan utama terletak pada lingkungan implementasi. Teori Grindle

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai faktor kapasitas pelaksana, infrastruktur, dan keterlibatan stakeholder. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

Menurut teori proses implementasi kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, di antaranya: (1) Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Komunikasi yang efektif antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta (3) Karakteristik badan pelaksana. Sementara itu, Bambang Sunggono mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan, seperti: (1) Ketidakjelasan isi kebijakan, (2) Kurangnya informasi, dan (3) Terbatasnya dukungan (PD Pangestika, 2018).

1.6.3. Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati

Implementasi kebijakan publik merupakan proses dimana kebijakan yang telah dirancang diubah menjadi tindakan nyata. Proses tersebut melibatkan banyak pihak, meliputi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Kesuksesan implementasi ini tergantung pada berbagai faktor, seperti isi kebijakan, aktor yang terlibat, dan konteks implementasi.

Tabel 1. 9 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	
Implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.	Isi Kebijakan	Kepentingan Kelompok Sasaran	1) Kelompok yang ditargetkan 2) Respon dari apa yang di rasakan 3) Dampak secara langsung
		Tipe Manfaat	1) Manfaat <i>short-term</i> / jangka pendek 2) Manfaat <i>mid-term</i> / jangka menengah 3) Manfaat <i>long-term</i> / jangka panjang
		Derajat Perubahan yang diinginkan	1) Skala perubahan yang di targetkan

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	
			2) Tingkat kesulitan pada mencapai perubahan 3) Waktu yang di butuhkan untuk melihat hasil perubahan
		Letak Pengambilan Keputusan	1) Tingkat pemerintahan pembuat kebijakan 2) Tingkat pemerintahan pelaksana kebijakan 3) Interaksi antar – tingkat pemerintahan
		Pelaksanaan Program	1) Perencanaan kebijakan 2) Pengorganisasian implementasi 3) Pelaksanaan program
		Sumberdaya yang di libatkan	1) Ketersediaan SDM 2) Ketersediaan anggaran 3) Ketersediaan sarana, dan prasarana
	Lingkungan Implementasi	Kekuasaan, Kepentingan, dan Aktor yang terlibat	1) Aktor politik 2) Aktor sosial 3) Aktor ekonomi

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	
		Karakteristik Lembaga	1) Struktur organisasi 2) Budaya organisasi 3) Norma organisasi
		Kepatuhan dan Daya Tanggap	1) Persepsi terhadap kebijakan 2) Tingkat kepatuhan 3) Motivasi untuk patuh

1.7.2 Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan Program

Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati

Menurut Budi Winarno, implementasi kebijakan publik dalam pengertian yang luas merupakan instrumen administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan yang diinginkan (Winarno 2002: 102). Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), mendefinisikan penghambat sebagai sesuatu yang menyebabkan tujuan atau keinginan tidak dapat terealisasi.

Tabel 1. 10 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	
Faktor pendukung implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati	Faktor Pendukung	Ukuran dan tujuan kebijakan	1) Keterjelasan dan kejelasan tujuan 2) Pengukuran pencapaian tujuan 3) Penggunaan hasil pengukuran
		Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan	1) Kualitas komunikasi antar pelaksana 2) Efektivitas koordinasi 3) Partisipasi semua pihak
		Karakteristik badan – badan pelaksana	1) Struktur organisasi 2) Kapasitas sumber daya manusia 3) Sistem dan prosedur
Faktor penghambat implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati	Faktor Penghambat	Isi Kebijakan	1) Kejelasan tujuan kebijakan 2) Keterkaitan antar elemen kebijakan 3) Tingkat detail kebijakan
		Informasi	1) Ketersediaan informasi 2) Relevansi informasi 3) Penggunaan informasi
		Dukungan	1) Jenis dukungan yang tersedia 2) Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan 3) Efektivitas dukungan

1.8 Argumen Penelitian

Evaluasi menjadi indikator kesuksesan suatu kebijakan, karena tidak semua program kebijakan yang dibuat akan meraih tujuan yang diinginkan maka, perlu dilakukannya evaluasi sebagai penilaian terhadap kegagalan – kegagalan pada suatu kebijakan guna mengetahui sejauh mana implementasi program kebijakan pada meraih dampak yang diinginkan (Ida Stafriyani 2023:67).

Program wajib belajar di Kabupaten Pati telah berjalan cukup lama namun kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan. Rendahnya kompetensi guru, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala utama pada memberikan pembelajaran yang efektif. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, juga menghambat proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah menjadi pertanyaan besar. Faktor ekonomi keluarga yang lemah, terutama di kalangan masyarakat miskin, seringkali memaksa anak untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi dan manfaat jangka panjangnya juga menjadi penghambat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan merangkum

berbagai kondisi, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Sebagaimana ditegaskan Basrowi dan Suwandi (2008:27), penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan pada suatu bidang yang spesifik dan unik untuk mengembangkan hipotesis atau teori yang dapat dibagikan secara luas. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjawab dan memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial. Untuk menghindari pengukuran dan perbandingan variabel satu sama lain, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, catatan, dan catatan dari penelitian dari lapangan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, satu – satunya variabel yang dipertimbangkan pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati.

1.9.2 Fokus dan Situs Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada area yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian dan harus dijelaskan secara jelas agar mempermudah peneliti. Fokus ini menggambarkan inti dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati. Adapun lokasi penelitian mencakup: (1) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

Provinsi Jawa Tengah, (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, (3) Dewan Pendidikan Kabupaten Pati, (4) SMA di Kabupaten Pati, dan (5) Masyarakat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada informan yang terlibat dalam penelitian. Pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendukung kelancaran proses penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dan purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2011:85), purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan tujuan tertentu, di mana sampel dipilih karena dianggap dapat mewakili dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Kepala Cabang memiliki gambaran yang komprehensif tentang kebijakan pendidikan di wilayah tersebut. Beliau dapat memberikan gambaran umum tentang implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta tren terkini pada dunia pendidikan. Selain itu, Kepala Cabang Dinas juga memiliki akses ke data – data yang relevan dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang sistem pendidikan secara keseluruhan.

- b) Kasi SMA, SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Kasi SMA/SMK memiliki pengetahuan khusus tentang pengelolaan sekolah menengah atas dan kejuruan. Beliau dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai kurikulum, program – program khusus, serta tantangan yang dihadapi oleh sekolah – sekolah jenis ini. Selain itu, beliau juga dapat memberikan gambaran tentang koordinasi antara sekolah dengan dinas pendidikan.
- c) Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kasi SMP memiliki fokus pada pengelolaan sekolah menengah pertama. Beliau dapat memberikan informasi yang spesifik tentang karakteristik siswa SMP, kurikulum yang diterapkan, serta permasalahan yang sering dihadapi oleh sekolah – sekolah di tingkat SMP.
- d) Dewan Pendidikan Kabupaten Pati. Mereka memiliki pemahaman tentang kebijakan, program, dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tingkat lokal. Sebagai lembaga yang secara langsung terlibat pada perumusan kebijakan dan pengawasan pendidikan, dewan pendidikan memiliki akses ke data dan informasi yang relevan serta pandangan yang komprehensif mengenai berbagai aspek pendidikan. Selain itu, keterlibatan mereka secara aktif pada berbagai kegiatan pendidikan memungkinkan mereka memberikan perspektif yang luas.

- e) Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Pati. Kepala sekolah menjadi informan kunci karena dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kurikulum, interaksi guru – siswa, serta berbagai program yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga dapat memberikan masukan mengenai efektivitas kebijakan pendidikan dan perspektif sekolah.
- f) Guru SMA di Kabupaten Pati. Guru sebagai pelaksana kurikulum, berinteraksi dengan siswa, serta melaksanakan berbagai program yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, guru juga dapat memberikan masukan mengenai efektivitas kebijakan pendidikan dan perspektif sekolah.
- g) Siswa SMA di Kabupaten Pati. Siswa merupakan sumber informasi yang sangat berharga untuk memahami pengalaman belajar secara langsung. Mereka dapat memberikan gambaran tentang suasana belajar di kelas, interaksi dengan guru, serta kendala yang mereka hadapi pada proses belajar. Informasi dari siswa juga dapat memberikan masukan mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa.
- h) Orang Tua. Mereka dapat memberikan informasi mengenai harapan dan ekspektasi mereka terhadap pendidikan, serta kendala yang mereka hadapi pada mendukung proses belajar anak. Selain

itu, orang tua juga dapat memberikan masukan mengenai kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada keluarga mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2014), snowball sampling adalah metode pemilihan sampel yang dimulai dengan sejumlah kecil individu dan kemudian berkembang. Peneliti memilih teknik ini karena pada tahap awal, hanya satu atau dua orang yang dipilih sebagai sampel. Namun, karena data yang diperoleh masih dianggap kurang lengkap, peneliti kemudian mencari individu lain untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif, menurut Sugiyono (2015), adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar dimana pada penelitian ini berupa nama dan alamat .
2. Data kuantitatif, menurut Sugiyono (2015), adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikonversi menjadi angka.

Dari dua jenis data di atas pada penelitian ini nantinya menggunakan data kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara proses implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati. Dengan memakai pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Data kualitatif yang berupa kata – kata, narasi, dan deskripsi akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci kompleksitas kebijakan di lapangan.

1.9.5 Sumber Data

Pada sebuah penelitian data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka - angka yang membuktikan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulnya. Biasanya, jenis data ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa sumber yang dapat dipercaya.

Data primer akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan. Wawancara ini akan menggali pemahaman, pengalaman, dan perspektif mereka mengenai program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Contohnya, data sekunder dapat diperoleh melalui pihak ketiga atau analisis terhadap dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari literatur, artikel, jurnal, dan situs-situs internet yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data sekunder ini akan diambil dari berbagai dokumen seperti laporan sekolah, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait. Data sekunder ini akan digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan untuk memvalidasi temuan dari data primer. Penggabungan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan program wajib belajar 12 tahun di masa depan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Menurut Moleong (2012, 186) wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dan memiliki pengetahuan terkait pokok permasalahan, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang subjek penelitian. Wawancara merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menggali data melalui interaksi langsung.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan psikis secara sistematis. Menurut Kartono (1980), observasi bertujuan memahami karakteristik perilaku manusia dan hubungannya dengan fenomena sosial dalam konteks budaya tertentu. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati, mencakup faktor pendukung dan penghambat implementasinya..

3. Dokumentasi

Gottschalk Louis (1986) menyebutkan bahwa dokumen adalah sumber informasi tertulis yang berperan dalam merekam sejarah, berbeda dari kesaksian lisan, artefak, atau peninggalan arkeologis. Contohnya meliputi surat resmi, perjanjian, undang-undang, dan hibah. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup catatan kegiatan, laporan kerja, serta materi terkait lainnya yang mendukung analisis isu yang dibahas.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku – buku referensi dan bahan – bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2003:31)

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dalam penelitian kualitatif melibatkan interpretasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono, mengutip Miles dan Huberman, proses analisis bersifat interaktif hingga data jenuh tercapai, sehingga hasilnya mudah dipahami dan disampaikan. Ada tiga langkah yang terlibat pada kegiatan analisis data.

1. Reduksi Data (data reduction) Prosedur memadatkan informasi dan menentukan elemen-elemen kunci yang selaras dengan pertanyaan penelitian disebut reduksi data. Proses yang rumit ini menuntut wawasan, keluasan, dan pemahaman. Intinya,

reduksi data melibatkan merangkum, membuat prioritas, memfokuskan pada elemen-elemen penting, mengidentifikasi pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.

2. Penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah reduksi data, di mana data diorganisasi untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Data disusun dengan cara yang mudah dipahami, biasanya dalam bentuk pola relasional. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi singkat atau format serupa dapat digunakan untuk menyajikan data yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh sering kali berupa temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan tersebut dapat muncul sebagai penjelasan deskriptif atau gambaran yang lebih jelas tentang objek atau fenomena yang sebelumnya belum dipahami dengan jelas.

Pada hakikatnya analisis data kualitatif adalah suatu proses menemukan dan mengumpulkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis melalui tahapan reduksi data (merangkum informasi), display data (menyajikan informasi pada suatu tampilan), dan verifikasi data

(mengkonfirmasi/membuktikan informasi). Hal ini memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan berharga bagi orang lain.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengikuti standar kredibilitas agar penelitian yang dilakukan memiliki tingkat kebenaran data dan kepercayaan yang tinggi, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Triangulasi adalah langkah yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan sumbernya. Ini berarti perlu dilakukan upaya perbandingan dan pemeriksaan berulang kali untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan akurat.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna sebagai penguji kredibilitas data dengan memverifikasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber.

2) Triangulasi Teknik

Untuk mengevaluasi keandalan data, teknik triangulasi melibatkan perbandingan data dari sumber yang sama dengan memakai berbagai pendekatan. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat diperiksa lebih lanjut melalui observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi waktu

Kredibilitas data dipengaruhi oleh waktu pengumpulan. Wawancara yang dilakukan di pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum banyak menghadapi masalah, cenderung menghasilkan informasi yang lebih valid dan dapat dipercaya. Untuk memastikan kredibilitasnya, data dapat diverifikasi dengan wawancara atau observasi pada kondisi yang berbeda.